UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Pemungutan Pajak Penghasilan terhadap Badan Usaha Agregator dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
Ditinjau dari Asas Keadilan
Sahl Radian Setyaki, Dahliana Hasan, S.H., M.Tax., Ph.D.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ashofa, Burhan, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.

Asshidiqie, Jimly, 2014, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim, 2016, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Kencana, Depok.

Rawls, John, 1999, *A Theory of Justice*, The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts.

Mardiasmo, 2006, *Perpajakan*, Penerbit Andi, Yogyakarta.

Mertokusumo, Sudikno, 2005, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.

Moertiono, Juli, 2024, *Hukum Perusahaan: Perkembangan Perusahaan & Jenis Usaha di Era Informasi*, UMSU Press. Medan.

Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram.

Musgrave, Richard A., dan Peggy B. Musgrave, 1993, *Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek*, Penerbit Erlangga, Jakarta.

Mustaqiem, 2014, *Perpajakan dalam Konteks Teori dan Hukum Pajak di Indonesia*, Litera, Yogyakarta.

Pudyatmoko, Y. Sri, 2009, *Pengantar Hukum Pajak*, Penerbit Andi, Yogyakarta.

Rosdiana, Haula dan Edi Slamet Irianto, 2013, *Pengantar Ilmu Pajak*, Rajawali Press, Jakarta.

Soemitro, Rochmat dan Dewi Kania Sugiharti, 2004, *Asas dan Dasar Perpajakan 1*, Refika Aditama, Bandung.

Suandy, Erly, 2014, *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Jakarta.

Sunggono, Bambang, 2007, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Pemungutan Pajak Penghasilan terhadap Badan Usaha Agregator dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
Ditinjau dari Asas Keadilan
Sahl Radian Setyaki, Dahliana Hasan, S.H., M.Tax., Ph.D.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

B. Artikel Jurnal

Aini, Karina Nur dan Nunuk Indart, "Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai Instrumen Peningkatan Kesadaran Pajak Masyarakat di Grati", *Business and Accounting Education Journal*, Vol. 6, No. 3.

Aji, Pandam Bayu Seto, "Bagaimana Teori Kontrak Sosial Mempengaruhi Pandangan Modern Tentang Legitimasi Hukum?", *Al Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Vol. 4, No. 2, 2026.

Andriyanty, Reny dan Widyastutik, "Kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG): Bagaimana Pengaruhnya terhadap Kesejahteraan Petani", *Jurnal Risalah Kebijakan Pertanian dan Lingkungan*, Vol. 12, No. 2, 2025.

Angelia, Alissa, dan Kemal Fikri Royadi, "Kontrak Sosial sebagai Instrumen untuk Mencapai Ketertiban Umum dalam Masyarakat Anarkis", *Mimbar Hukum*, Vol. 35, No. 2, 2023.

Faiz, Pan Mohamad, "Teori Keadilan John Rawls", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 6, No. 1, 2009.

Fattah, Damanhuri, "Teori Keadilan Menurut John Rawls", *Journal Tapis: Journal Teropong Aspirasi Politik Islam*, Vol. 9, No. 2, 2013.

Gotama, Alexandra Weendra Puspa, Ainola Shaliha Lasut, dan Fiona Louysa Rondo, "Urgensi Keadilan Pemungutan Pajak: Analisis Relasi Negara dan Wajib Pajak", *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)*, Vol. 4, 2025.

Kumaratih, Cinantya, dan Budi Ispriyarso, "Pengaruh Kebijakan Perubahan Tarif PPh Final terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 2, No. 2, 2020.

Mankiw, N. Gregory, Matthew Weinzierl, dan Danny Yagan, "Optimal Taxation in Theory and Practice", *Journal of Economic Perspectives*, Vol. 23, No. 4, 2009.

Maryam, Rika, "Yayasan dalam Program Makan Bergizi Gratis: Profit atau Non Profit", *Jurnal Penelitian Hukum Galunggung*, Vol. 3, No. 1, 2026.

Saepuloh, Fuad Hilmi, "MBG (Makan Bergizi Gratis) sebagai Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Lokal: Analisis Model SPPG dan Tantangan Tata Kelola Publik", *EKALAYA Jurnal Ekonomi Akuntansi*, Vol. 4, No. 1, 2026.

Pemungutan Pajak Penghasilan terhadap Badan Usaha Agregator dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
Ditinjau dari Asas Keadilan
Sahl Radian Setyaki, Dahliana Hasan, S.H., M.Tax., Ph.D.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Salim, Muhamad Refqi, Muhammad Raka Harsyarudin, Muhammad Chairil, dan Rulinawaty, "Program Makan Bergizi Gratis dan Beban Fiskal Negara: Investasi Sosial atau Risiko Anggaran?", *Jurnal Inovasi dan Kajian Multidisipliner Kontemporer*, Vol. 1, No. 3, 2026.

Sari, Suli Mei, Ida Nadirah, Pangulu Siregar, Zein Idris P, dan Nuraini Simanjuntak, "Analisis terhadap Fungsi Pajak sebagai Alat Pengatur dalam Pembangunan Nasional", *IKRAITH-HUMANIORA: Jurnal Sosial dan Humaniora*, Vol. 9, No. 2, 2025.

Suardi dan Amy Syah Purmadani, "Makan Bergizi Gratis dan Dampak bagi Pertumbuhan Ekonomi", *Jurnal Bisnis Net*, Vol. 8, No. 1, 2025.

Suprapto, Firre An, Editha Praditya, Reffi Marizka Dewi, dan Wignyo Adiyoso, "Policy Implementation Review of the Free Nutritious Meal (MBG) Program", *The Journal of Indonesia Sustainable Development Planning*, Vol. 6, No. 2, 2025.

Yolanda, Cindy, dan Uswatun Hasanah, "Peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam Pengembangan Ekonomi Indonesia", *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, Vol. 2, No. 3, 2024.

C. Hasil Penelitian/Tugas Akhir

Junius, Lukas Gloryan, 2022, *Pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto di Indonesia Ditinjau dari Asas Keadilan*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Wicaksono, Bondan, 2022, *Implementasi Pemungutan Pajak UMKM pada Kedai Kopi di Kabupaten Bantul Ditinjau dari Pendekatan Kepatuhan Pajak*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

D. Dokumen Pemerintah

Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2025, *Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2026*, Kementerian Keuangan RI, Jakarta.

Kementerian PPN/Bappenas, 2024, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025–2029*, Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta.

E. Laporan atau *Working Paper*

Ambrosi, Gerhard Michael, 2007, *Aristotle's Geometrical Model of Distributive Justice*, Social Science Research Network (SSRN), Rochester.

UNIVERSITAS GADJAH MADA
Pemungutan Pajak Penghasilan terhadap Badan Usaha Agregator dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Ditinjau dari Asas Keadilan
Sahl Radian Setyaki, Dahliana Hasan, S.H., M.Tax., Ph.D.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI), 2024, *Makan Bergizi Gratis: Menilik Tujuan, Anggaran dan Tata Kelola Program*, CISDI, Jakarta.

Huda, Nailul, dan Dyah Ayu Febriani, 2024, *Makan Bergizi Gratis: Dampak Ekonomi dan Konsekuensi Defisit APBN*, CELIOS, Jakarta.

Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), 2025, *Efek Pengganda Program Makan Bergizi Gratis Tahun 2025*, INDEF, Jakarta.

Singh, Abhijeet, Albert Park, dan Stefan Dercon, 2012, *School Meals as a Safety Net: An Evaluation of the Midday Meal Scheme in India*, Working Paper No. 75, Young Lives, Oxford.

F. Internet

BBC News Indonesia, "APBN 2026: Defisit Rp689,1 Triliun", https://www.bbc.com/indonesia/articles/c4gkw2wxpw2o, diakses 3 November 2025.

Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, "Presiden Prabowo: Program Makan Bergizi Gratis Adalah Investasi untuk Masa Depan Bangsa", https://www.presidenri.go.id/siaran-pers/presiden-prabowo-program-makan-bergizi-gratis-adalah-investasi-untuk-masa-depan-bangsa/, diakses 3 November 2025.

BPMI Setpres, "Presiden Prabowo Terima Laporan DEN, Survei MBG Tunjukkan Dampak Positif bagi UMKM", https://presidenri.go.id/siaran-pers/presiden-prabowo-terima-laporan-den-survei-mbg-tunjukkan-dampak-positif-bagi-umkm/ diakses 7 Juli 2026.

Humas Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, "Kementerian UMKM Maksimalkan Peran UMKM sebagai Penggerak Merdeka Gizi Melalui MBG", https://umkm.go.id/news/of5yk49oas27w17ph2uozpae, diakses 4 Januari 2026.

G. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Pemungutan Pajak Penghasilan terhadap Badan Usaha Agregator dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
Ditinjau dari Asas Keadilan
Sahl Radian Setyaki, Dahliana Hasan, S.H., M.Tax., Ph.D.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355).

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619).

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7173).

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6840).

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Pemungutan Pajak Penghasilan terhadap Badan Usaha Agregator dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
Ditinjau dari Asas Keadilan
Sahl Radian Setyaki, Dahliana Hasan, S.H., M.Tax., Ph.D.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115).

Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 173).

Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 183).

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2024 tentang Fasilitas Perpajakan dan Kepabeaan di Ibu Kota Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 384).

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu dan Kewajiban Pelaporan Usaha untuk Dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1109).

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Layanan Jasa Hukum Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Komanditer (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 812).

Keputusan Kepala Badan Gizi Nasional Republik Indonesia Nomor 401.1 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis Tahun Anggaran 2026.

Keputusan Deputi Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional Nomor 009/05/01/SK.09/08/2025 tentang Petunjuk Teknis Pemilihan Yayasan dan Mitra Yayasan dalam Pengelolaan SPPG pada Program Makan Bergizi Gratis.

Keputusan Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola Nomor BGN 010/05/01/SK.10/08/2025 tentang Petunjuk Teknis Pembuatan Rekening SPPG dan Penggunaan Dana Makan Bergizi Gratis